

**LAPORAN  
INVESTIGASI DAN PEMANTAUAN  
KASUS SYI'AH SAMPANG**



**KontraS Surabaya  
2012**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>Pendahuluan.....</b>	<b>2</b>
<b>I.1</b>	<b>Latar Belakang .....</b>	<b>2</b>
<b>I.2</b>	<b>Tujuan .....</b>	<b>2</b>
<b>I.3</b>	<b>Metode .....</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Syiar Kebencian dan Penyesatan .....</b>	<b>3</b>
<b>II.1.</b>	<b>Awal terbentuknya komunitas syiah di Sampang .....</b>	<b>3</b>
<b>II.2</b>	<b>Syiar Kebencian dan penyesatan terhadap Komunitas Syiah Sampang ...</b>	<b>4</b>
<b>II.3</b>	<b>Terusir dari kampung halaman .....</b>	<b>6</b>
<b>III</b>	<b>Aksi Kekerasan dan Fatwa Sesat .....</b>	<b>10</b>
<b>III.1</b>	<b>Kronologi Pembakaran Rumah dan Pesantren .....</b>	<b>10</b>
<b>III.2</b>	<b>Intimidasi di pengungsian dan fatwa sesat atas pengikut ajaran syi'ah ....</b>	<b>11</b>
<b>IV</b>	<b>Kesimpulan dan Rekomendasi .....</b>	<b>16</b>
<b>IV.I.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>16</b>
<b>IV.II.</b>	<b>Rekomendasi .....</b>	<b>16</b>

# I

## Pendahuluan

### I.1 Latar Belakang

Hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 E, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant Civil and Politic Rights. Akan tetapi -dalam prakteknya- pemenuhan, penghormatan dan perlindungan atas hak dasar ini nyatanya tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagian warga negara, terutama dari kelompok minoritas sangat sering terabaikan. Bahkan dalam banyak kasus, tidak sedikit kelompok yang menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alat pembenar untuk menghakimi kelompok lain utamanya terhadap mereka yang dianggap meyakini suatu keyakinan yang dianggap berseberangan dengan mayoritas. Inilah hal yang ironi bagi bangsa Indonesia yang bersemboyan Bhineka ungal Ika. Kasus syi'ah Sampang, kasus ahmadiyah, kasus gereja HKBP philadelphia, dan kasus-kasus lain yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia adalah bukti akan hal itu.

Kasus Syi'ah Sampang yang dimaksud dalam Laporan ini adalah peristiwa kekerasan atas jamaah syiah di Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang terjadi pada 29 Desember 2011. Dimana sejak awal 2011, potensi kekerasan yang mengancam komunitas syi'ah telah menjadi perhatian KontraS Surabaya. Di Sampang, komunitas Syiah merupakan kelompok minoritas kecil yang keberadaannya relatif baru. Jumlahnya hanya beberapa ratus orang saja. Akan tetapi, mereka harus menyalurkan nyawa melawan syi'ar kebencian dan penyesatan dari hampir semua tokoh agama Islam di Sampang dan sebagian Pamekasan yang mewakili kelompok muslim mayoritas. Dalam konteks geopolitik Jawa timur, peristiwa ini adalah catatan hitam. Jawa timur yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah yang sangat toleran terhadap kelompok minoritas, dengan peristiwa ini menunjukkan bahwa Jawa timur telah bergeser ke arah yang sebaliknya.

Secara substansi, kegiatan pemantauan dan investigasi dalam kasus syiah sampang dilaksanakan KontraS Surabaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan paling dasar, mengapa negara -dengan segala instrument dan perangkat yang dimilikinya- tidak mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam peristiwa ini?

### I.2 Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan investigasi ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengumpulkan data, informasi dan keterangan dari semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung tentang fakta-fakta dalam peristiwa kasus syiah sampang
2. Mengidentifikasi bukti-bukti pelanggaran hak azasi manusia dalam kasus syiah sampang
3. Mengidentifikasi peran aktor Negara dan aktor sipil dalam kasus syiah sampang

### I.3 Metode

Metode pemantauan Investigasi dan Pemantauan yang digunakan adalah :

1. Melakukan pemantauan langsung ke lokasi kejadian dan live in bersama korban
2. Melakukan wawancara secara mendalam kepada sejumlah aktor kunci dalam peristiwa ini
3. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait peristiwa ini termasuk pemebritaan media massa.

## II Syiar Kebencian dan Penyesatan

### II.1. Awal terbentuknya komunitas syiah di Sampang

Pada awal 1980-an, Makmun, seorang kiai di Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang, mendapatkan kabar dari sahabatnya di Iran mengenai revolusi Iran. Keberhasilan kaum ulama Iran memimpin revolusi penumbangan monarki Syah Iran Reza Pahlevi –sebuah rezim monarki yang didukung oleh USA– menjadi momentum bagi kaum muslim di dunia dan termasuk Indonesia untuk menengok dan mempelajari ajaran syi'ah. Makmun sangat terinspirasi dengan revolusi Islam Iran dan mengagumi pemimpinnya Ayatollah Ali Khomeini, selanjutnya hal ini menjadi pendorong bagi Makmun untuk mendalami ajaran-ajaran syiah. Makmun sadar bahwa mengajarkan syiah di desanya dan di Madura pada umumnya bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena mayoritas ulama dan kaum muslim di wilayah ini adalah pengikut Islam Sunni yang fanatik, karena itu Makmun dalam mempelajari dan mengajarkan ajaran-ajaran syiah dilakukannya secara pelan, tidak secara langsung dan tidak terbuka. Sebagai awal, pada 1983, Makmun lantas mengirim tiga anak laki-lakinya, Iklil al Milal (42 tahun), Tajul Muluk (40), Roisul Hukama (36), dan ummi Hani ke Pesantren Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan. YAPI dikenal sebagai pesantren yang cenderung pada mazhab Syiah Ja'fariyah. Pada 1991, anak-anak Makmun telah kembali ke Sampang. Diantara anak-anak Makmun yang belajar di YAPI hanya Tajul Muluk, yang melanjutkan sekolah ke pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki di Arab Saudi pada 1993. Karena terkendala biaya, sekolahnya berhenti di tengah jalan. Tajul Muluk yang bernama asli Ali Murtadha tetap bertahan di Arab Saudi menjadi pekerja dan kembali pulang ke Indonesia pada tahun 1999.

Pulang ke Indonesia, Tajul Muluk menetap di tempat kelahirannya, Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam, Sampang. Keluarga Makmun dan masyarakat di dusunnya menyambutnya dengan gembira. Sejumlah warga desa yang juga murid dari Makmun sang ayah, mewakafkan sebidang tanah untuk didirikan pesantren. Secara gotong royong pada awal tahun 2004 warga desa yang belajar mengaji kepada Makmun dan Tajul Muluk bersama-sama membantu mendirikan rumah kediaman Tajul Muluk yang berfungsi menjadi pesantren, lengkap dengan mushola dan beberapa ruangan kelas untuk aktifitas belajar agama. Pesantren kecil ini diberi nama Misbahul Huda, dan ustadz atau guru yang mengajar di pesantren ini adalah Tajul Muluk bersama semua saudara-saudaranya sesama alumni YAPI. Berbeda dengan Makmun sang ayah, Tajul Muluk mengajar dan berdakwah ajaran syiah secara terbuka dan terang-terangan. Sikap Tajul yang egaliter, supel, ringan tangan dan cekatan dalam membantu warga desa yang membutuhkan, serta tidak bersedia menerima imbalan setelah berceramah agama menempatkan Tajul sebagai kyai muda yang sangat dihormati seluruh warga desa Karang Gayam dan tentu saja hal ini mempermudah Tajul dalam berdakwah. Dalam waktu yang tidak lama, hanya sekitar tiga tahun, ratusan warga di Desa Karang Gayam dan di desa sebelahnya Desa Blu'uren telah menjadi pengikut ajaran syiah dan sekaligus murid Tajul Muluk yang setia.

Perkembangan dakwah Tajul Muluk dalam menyebarkan syi'ah akhirnya mendapat respon dari para ulama setempat. Tersebutlah Ali Karrar Shinhaji, Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan dan masih terhitung kerabat dekat dari Makmun. Dalam sebuah pertemuan dengan Tajul dan saudara-saudaranya pada awal 2004, Karrar sangat berkeberatan dan tidak menyetujui aktivitas dakwah Tajul Muluk yang mengajarkan ajaran syi'ah, baginya syiah adalah mazhab dalam Islam yang salah dan sesat. Tidak hanya Karrar, para ulama-ulama lain di Omben juga bersikap yang sama, akan tetapi mereka tidak bisa menghalang-halangi aktifitas dakwah Tajul Muluk karena menaruh masih menaruh rasa hormat atas Kyai Makmun, ayah dari Tajul Muluk. Akan tetapi, pada Juni 2004 Kyai Makmun yang sebelumnya sudah jatuh sakit akhirnya meninggal dunia. Dan tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi para ulama di Omben untuk menentang aktivitas penyebaran syiah yang dilakukan para kyai muda anak-anak Makmun.

## II.2 Syiar Kebencian dan penyesatan terhadap Komunitas Syiah Sampang

Pada pertengahan tahun 2005, Karrar memimpin inisiatif pengajian akbar di Desa Karang Gayam yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dan para kyai dari kecamatan omben. Tampaknya forum pengajian ini memang digunakan sebagai 'deklarasi' menentang komunitas syiah yang dipimpin oleh Tajul Muluk. Sejak itu, dilakukannya masyarakat umum di wilayah kecamatan omben tersiar kabar bahwa di desa karang gayam telah berkembang sebuah aliran sesat, yaitu syiah yang dipimpin oleh kyai muda bernama Tajul Muluk. Upaya untuk menyebarkan kebencian (hate speech), penyesatan, dan forum penghakiman terjadi secara terus menerus sejak tahun 2006. Berikut adalah rangkaian dari kejadian-kejadian penting terkait upaya penyesatan, syi'ar kebencian (*hate speech*), forum penghakiman, dan serangan kekerasan kepada Tajul Muluk dan komunitas Syiah di Sampang serta respon yang dilakukan pemerintah sejak 2006 sampai dengan akhir 2010 :

1. Pada 24 Februari 2006, atas inisiatif Abuya Ali Karrar Shinhaji, sejumlah ulama dari beberapa tempat di Madura berkumpul di rumah almarhum H. Sya'bi dan mengundang Ustad Tajul Muluk dengan agenda 'klarifikasi tuduhan sesat atas ajaran Syiah yang dibawa Tajul Muluk'. Pertemuan ini juga dihadiri H. Fadlilah Budiono, Bupati Sampang, dan juga Imron Rosyidi Kakandepag Sampang. Karena Tajul tidak hadir, maka pertemuan ini dilanjutkan pada 26 Februari 2006<sup>1</sup>;
2. Pada 26 Februari 2006, sebagai kelanjutan dari pertemuan tgl 24 Februari, sejumlah kiai yang kali ini diketuai Abd. Wahhab Adnan bersama dengan ketua MUI Sampang pada masa itu Mubassyr dan Kapolsek Omben mengundang Tajul Muluk di Masjid Landeko' Karanggayam di tempat kediaman kakek Tajul (Kyai Nawawi). Resminya pertemuan ini bernama Forum Musyawarah Ulama (FMU) Sampang-Pamekasan. Pertemuan ini dihadiri oleh semua yang hadir pada pertemuan 26 Februari 2006, mereka berkumpul kembali untuk mendengarkan jawaban Tajul Muluk. Tajul Muluk hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa syiah yang diajarkan tidak sesat, merupakan salah satu mazhab yang diakui dalam dunia islam, dan dirinya tidak bersedia keluar dari syiah. Karena tidak bisa merubah keyakinan Tajul, akhirnya FMU mengeluarkan keputusan yang isinya sebagai berikut :

*Mengajak pimpinan syi'ah ja'fariyyah (Tajul Muluk Makmun) untuk segera kembali ke jalan ahlu al-sunnah wa al-jama'ah dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinya bentrokan faham dan fisik di kalangan masyarakat awam yang sangat dikhawatirkan terjadi. Dan karena Tajul Muluk telah menolak tawaran FMU tersebut, maka FMU tidak bertanggungjawab atas segala apa yang terjadi dan memasrahkan persoalan kepada aparat yang berwajib. FMU menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) empat kabupaten di Madura agar segera menyatakan fatwa tentang bahaya aliran-aliran sesat termasuk aliran syi'ah yang meragukan keabsahan kitab suci al-qur'an, keadilan sahabat Nabi dan berghulu (berlebih-lebihan) dalam ahlu al-bait (keluarga Nabi)*

Dalam daftar hadir pertemuan tertera empat puluh orang yang hadir. Diantaranya terdiri dari pimpinan pesantren, tokoh masyarakat, MUI Sampang, Kapolsek Omben dan tiga anggotanya.<sup>2</sup> Sementara itu, pada hari yang sama di dusun Nangkernang ratusan ribuan massa mengepung dusun Nangkernang. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, namun ribuan massa tersebut melakukan aksi intimidasi terhadap warga dan mengepung rumah Tajul Muluk dan pesantren Misbahul Huda<sup>3</sup>.

3. Pada 09 April 2007, Tajul Muluk bersama keluarga dan santri-santrinya akan mengadakan peringatan maulid nabi yang dilaksanakan di rumahnya yang satu kompleks pesantrennya. Dalam kegiatan *maulidan* ini turut diundang sejumlah ustadz dan *ikhwan syiah*<sup>4</sup> dari luar Sampang. Belum lagi *maulidan* dimulai, ribuan massa dari beberapa desa yang bersenjata aneka ragam seajata tajam, kayu dan pentungan mengepung jalan masuk

<sup>1</sup> Wawancara dengan Tajul Muluk

<sup>2</sup> Lampiran Risalah pertemuan FMU (Forum Ulama Indonesia), 26 Februari 2006

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ikliil al Milal dan Tajul Muluk

<sup>4</sup> Ikhwan syiah adalah sebutan yang dipakai oleh jamaah syiah dalam menyebut para teman-teman mereka sesama jamaah syiah

- menuju desa Karang Gayam dan melakukan penghadangan terhadap semua tamu undangan yang datang. Massa dengan teliti mengawasi dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat, semua pengendara mobil yang melintas diwajibkan melambatkan laju kendaraannya. Untuk menghindari jatuhnya korban, sejumlah aparat dari Polres Sampang dan anggota TNI dikerahkan menjaga keamanan di sekitar rumah Tajul Muluk. Acara Mauludan tetap dilaksanakan dibawah pengawasan dan penjagaan aparat keamanan<sup>5</sup>.
4. Ditengah-tengah meningkatnya ancaman terhadap komunitas syiah di Sampang, pada Juni 2007, Tajul Muluk dan kedua saudaranya yaitu Iklil al Milal dan Roisul Hukama diangkat sebagai Pengurus Daerah IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) Sampang. Tajul Muluk terpilih sebagai ketua.
  5. Pada 17 September 2009, ratusan massa anti syiah bergerak mengepung nangkernang, dilain fihak, warga jamaah syiah bersiap akan melawan. Kekerasan bisa dihindari, setelah aparat keamanan membubarkan massa. Kejadian ini dipicu oleh penolakan Tajul Muluk untuk menghadiri suatu pertemuan yang diinisiasi beberapa ulama. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas keberatan para ulama atas keberadaan komunitas syi'ah di Nangkernang<sup>6</sup>.
  6. Pada 26 Oktober 2009, dalam suasana bulan Ramadhan, PC NU Sampang mengadakan pertemuan bersama ulama dan Muspika Kecamatan Omben untuk membahas keberadaan akifitas dakwah Tajul Muluk dan jamaah syiah di wilayah Kecamatan Omben. Pada intinya pertemuan ini adalah forum para ulama untuk menghakimi ajaran syiah yang disebarkan oleh Tajul Muluk sebagai ajaran sesat. Dalam pertemuan ini Tajul Muluk diberikan sejumlah 32 pertanyaan tentang ajaran-ajaran syiah yang dianggap sesat. Dalam keadaan terpojok, akhirnya Tajul Muluk menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan aktivitas mengajarkan ajaran Syiah di Sampang. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, PAKEM Kab. Sampang, MUI Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, PC NU Sampang, Ulama dan tokoh masyarakat mengeluarkan surat bersama yang isinya :
    1. *Bahwa Tajul Muluk tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran syiah karena sudah meresahkan warga.*
    2. *Bahwa Tajul Muluk bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran aliran tersebut di Kabupaten sampang.*
    3. *Bahwa apabila tetap melakukan ritual dan / atau dakwah maka Tajul Muluk siap untuk diproses secara hukum yang berlaku.*
    4. *Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM di Kabupaten Sampang akan selalu memonitor dan mengawasi aliran tersebut.*
    5. *Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkis selama yang bersangkutan (Tajul Muluk) menaati kesepakatan di poin (1) dan (2). Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh MUI Kab. Sampang, Ketua DPRD Kab. Sampang, Ketua PCNU Kab. Sampang, Depag Kab. Sampang, KA Bakesbangpol Kab. Sampang serta tokoh Ulama' / Da'i kamtibmas<sup>7</sup>.*
  7. Selanjutnya, surat pernyataan bersama ini menjadi legitimasi bagi pihak yang anti atas keberadaan jamaah syiah di Karang Gayam dan Blu'uren untuk menyerang Tajul Muluk beserta pengikutnya dari desa mereka apabila menjalankan aktifitas keagamaan ajaran syiah dan menyebarkan syi'ar kebencian di majelis pengajian, mushola atau surau dan masjid. Akibatnya, masyarakat di wilayah kedua desa ini terbelah menjadi dua pihak yang saling berhadapan. Di satu sisi adalah para pengikut ajaran syiah dan keluarga mereka, dan disisi lain adalah warga sunni dan keluarganya. Suasana di kedua desa ini telah berubah menjadi *perang dingin* yang setiap saat dapat meledak menjadi perang terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, warga sunni seringkali mencemooh warga syiah, tidak menerima makanan pemberian mereka, ketika disapa tidak membalas, dan sebagainya. Adapula sampai terjadi perceraian diantara suami-istri karena suaminya mengikuti ajaran syiah sedangkan istrinya tidak<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Wawancara dengan warga jamaah syiah, Tajul Muluk, dan Rudi- Kepala Bakesbang Kab. Sampang

<sup>6</sup> Keetarang dari Rudi Setiadi Kepala Bakesbang Sampang

<sup>7</sup> Risalah hasil pertemuan

<sup>8</sup> Wawancara dengan iklil al milal

Ditengah-tengah gencarnya syiar kebencian dan penyesatan atas ajaran syiah, pada awal 2010 terjadi perselisihan keluarga antara Tajul Muluk dengan adiknya, Rais. Perselisihan ini disebabkan karena Tajul telah menikahkan Halima (16) dengan tetangganya tanpa sepengetahuan Rais, sedangkan Halima adalah santriwati yang berguru kepada Rais. Rais marah dan merasa tidak dihormati, karena sebagai guru Halima, seharusnya dialah yang menikahkan Halima, bukannya Tajul. Belakangan diketahui bahwa kemarahan Rais bukan saja karena merasa tidak dihormati, tetapi Rais menaruh hati kepada halima dan berencana akan menikahnya. Setelah kejadian ini, Rais sangat dendam dan memusuhi Tajul serta saudara-saudaranya yang lain yang mendukung Tajul termasuk sang ibu. Sejak peristiwa Halima, Rais menyatakan keluar dari syiah, dan selanjutnya menjadi orang yang sangat antusias menyebarkan syiar kebencian, seruan permusuhan, issue tentang kesesatan dan bahaya dari ajaran syiah. Rais pula yang dengan gencar menyerukan agar Tajul Muluk beserta murid-muridnya diusir dari Desa Karanggayam. Dan akhirnya karena peranan Rais lah serangan dan penyesatan atas komunitas syiah di Karanggayam mengalami eskalasi yang terus meningkat dan mengarah pada tindak kekerasan.

### II.3 Terusir dari kampung halaman

Pada akhirnya tuntutan para ulama anti syi'ah mengerucut pada dua opsi, Tajul Muluk harus keluar dari desanya atau Tajul harus keluar dari ajaran syiah dan berpindah ke Sunni. Dan, bak gayung bersambut tuntutan para tokoh agama ini segera mendapat persetujuan dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Sampang. Dalam konflik syiah-sunni, pemerintah Sampang sama sekali tidak mendorong adanya penghormatan dan perlindungan bagi kelompok minoritas syiah yang tidak berdaya, alih-alih melakukan hal itu, pemerintah (termasuk kepolisian) justru melegitimasi tuntutan dan serangan yang dilakukan mayoritas ulama sunni Sampang atas Tajul Muluk dan komunitasnya. Berikut adalah rangkaian kejadian yang berakhir dengan terusirnya Tajul Muluk dari desa dan terpisah dari keluarga serta murid-muridnya :

1. Pada 21 februari 2011, Tajul Muluk beserta jama'ahnya mengadakan peringatan Maulid Nabi di pesantrennya. Seperti kejadian pada tahun 2007, ribuan massa menutup dan merusak jalan masuk menuju Desa Karang Gayam. Kali ini salah satu pelopor penggerak massa penyerang adalah Raisul Hukama. Jumlah massa mencapai ribuan, menurut keterangan Rais di salah satu media, massa berasal dari 5 desa di sekitar Karang Gayam, yaitu Desa Soko Banah, Desa Ketapang, Desa Karang Penang, Desa Blu Uran, desa Tlambah. Dalam peristiwa ini Bassra (Badan silaturahmi ulama Madura) menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengerahan massa. Bassra mengeluarkan tuntutan agar Tajul Muluk menghentikan aktifitas mengajarkan syiah dan berpindah ke ajaran sunni dan apabila tajul muluk tidak bersedia maka Tajul Muluk harus keluar dari Madura. Sejumlah aparat keamanan dikerahkan menjaga kediaman Tajul Muluk. Sementara itu, untuk melegitimasi tuntutannya, ulama-ulama di Kecamatan Omben memobilisasi pengumpulan tanda tangan masyarakat untuk menyatakan petisi penolakan terhadap komunitas syi'ah di Omben. Adapun isi dari Petisi adalah:
  1. *Tajul Muluk keluar dari desa Karang Gayam dan meninggalkan wilayah Kabupaten Sampang.*
  2. *Tajul Muluk dilarang menyebarkan ajarannya.*
  3. *Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka Tajul Muluk akan diusir secara paksa oleh masyarakat Desa Karang Gayam*<sup>9</sup>
2. Pada 2 april 2011, ratusan massa kembali bergerak menuju rumah dan pesantren Tajul, mereka menuntut Tajul harus keluar dari desa Karang gayam, atau rumah dan pesantrennya akan dibakar. Merespon tuntutan massa dan dengan alasan keamanan, Polres Sampang memutuskan membawa dan mengamankan Tajul Muluk ke kantor Polres Sampang. Pada awalnya Tajul menolak, tetapi karena Polres tidak bisa memberikan jaminan keamanan terhadap keluarga dan murid-muridnya, maka dengan terpaksa Tajul bersedia diamankan di Kantor Polres Sampang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rais

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tajul Muluk

3. Berdasarkan runutan kronologis yang dicatat oleh Kesbang Kabupaten Sampang, untuk merespon situasi di Karang Gayam yang semakin memburuk Pemerintah Kabupaten Sampang telah mengadakan serangkaian pertemuan-pertemuan sebagai berikut <sup>11</sup>:
- a) Pada 4 april 2011, Pemkab Sampang melakukan rapat koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sampang. Rapat ini dipimpin oleh Bupati Sampang dan diikuti Forum Pimpinan Daerah Kab. Sampang, Muspika Kec. Omben, Muspika Kec. Karang Penang, tokoh agama dan masyarakat (kyai/ulama) dan masyarakat di sekitar desa Karang Gayam dan desa Blu'uran. Di dalam pertemuan tersebut pemerintah mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Karang Gayam Kecamatan Omben dan desa Blu'uran kecamatan Karang Penang menolak ajaran Tajul Muluk dan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :
    - 1) *Akan merelokasi Tajul Muluk beserta keluarga untuk sementara waktu keluar dari desa Karang Gayam kecamatan Omben demi kondusifitasnya situasi di desa Karang Gayam Kecamatan Omben*
    - 2) *Akan dilakukan upaya-upaya pendekatan terhadap Rois al Hukama dan pengikutnya serta masyarakat Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang penang untuk dapatnya menahan diri agar tidak terseret konflik horizontal yang bernuansa SARA.*
  - b) Pada 5 April 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, diadakan pertemuan antara Kapolda Jawa Timur (Irjen Pol Untung S. Rajab) dengan ulama se-kabupaten Sampang untuk menemukan solusi dalam persoalan syiah di Sampang. Dalam pertemuan tersebut para ulama menyampaikan tuntutan agar pihak Kepolisian mendukung rencana merelokasi Tajul Muluk keluar dari desa Karang Gayam.
  - c) Pada 7 April 2011 pukul 13.00, diadakan rapat koordinasi Kominda Kab Sampang yang dipimpin wakil bupati Sampang. Dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh rois syuriah PC NU kabupaten Sampang (Syafiuddin Abd.Wahid), ketua MUI kabupaten Sampang (Buchori ma'sum), tokoh agama dari kecamatan Omben (Wadud Bahri, Abd. Wahab dan Lud), Halim Toha dari Kemenag Kabupaten Sampang, ketua DPRD Sampang (Imam Ubaidillah), Dandim 0828 Sampang, Wakapolres Sampang beserta jajarannya, Kejari Sampang, Bakesbangpol Sampang beserta jajarannya, Kabag Hukum Pemkab Sampang, Muspika kecamatan Omben, Kasat C Sosbud Polda Jatim, Kasat D criminal Polda Jatim, Intel Brimob Polda Jatim. Pertemuan ini menghasilkan keputusan : Tajul Muluk akan segera direlokasi keluar dari desa Karang gayam Kecamatan Omben (beberapa peserta rapat meminta agar Tajul Muluk dikeluarkan dari wilayah Pulau Madura).
  - d) Pada 10 April 2011 bertempat di rumah dinas camat Omben, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Muspika Omben dan Karang Penang, H. Wadud (kakek Tajul Muluk), Rais al Hukama, H. Lutfi, Kades Karang Gayam, tokoh ulama dan masyarakat Karang Gayam dan Desa Blu'uran membahas tentang keberadaan aktifitas dakwah Tajul Muluk. Dalam pertemuan ini beberapa tokoh agama tersebut menyatakan penolakan atas keberadaan komunitas syiah yang dipimpin Tajul Muluk dan mendesak pemerintah agar melarang aktifitas dakwah Tajul Muluk.<sup>12</sup>
  - e) Pada 11 April 2011 pukul 09.00 para ulama mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Darul Ulum di desa Gersempal Kecamatan Omben. Pesantren ini dipimpin oleh KH. Syafiudin Abd.Wahid. Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh para pejabat kabupaten Sampang dan Kapolres Sampang. Hasil pertemuan adalah:
    - *Polres menyatakan dukungannya atas rekomendasi ulama Sampang untuk merelokasi Tajul Muluk keluar dari pulau Madura dengan alasan untuk menjaga kondusifnya situasi keamanan di Madura.*
    - *Masyarakat tidak diperkenankan melakukan tindakan anarkis dan dianjurkan melakukan pendekatan persuasive kepada pengikut ajaran Tajul Muluk.*

---

<sup>11</sup> Berdasarkan kronologis dan dokumentasi yang dikeluarkan Bakesbang Kab. Sampang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Raisul Hukama



- *Kepada semua pihak diharapkan untuk bekerja sesuai dengan kewenangannya demi menjaga kondisi yang stabil*<sup>13</sup>.
- f) Masih pada hari yang sama, pada pukul 19.00 WIB, diadakan pertemuan antara pengurus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pengurus IJABI Wilayah Jatim bertempat di hotel AGIS Surabaya. Pertemuan dihadiri oleh :
- a. Asisten I dan III Setprov Jawa Timur
  - b. Polda Jawa Timur
  - c. Bakesbangpol Prov. Jawa Timur dan Kabupaten Sampang
  - d. Bakesbangpol kabupaten Sidoarjo
  - e. Polres Sampang
  - f. Pengurus pusat, pengurus wilayah Jawa Timur, pengurus Kabupaten Sampang Ikatan Ahlul Bait Indonesia (IJABI)
  - g. K. Tajul Muluk dan Iklil serta dua orang jama'ahnya.
- Dalam pertemuan ini menghasilkan beberapa pemahaman sebagai berikut :
- (1) Pemerintah berpandangan bahwa konflik agama di Sampang dilatar belakangi oleh masalah keluarga antara Tajul dan Rois, karena itu pemerintah meminta Ijabi untuk mendamaikan Tajul Muluk dan Rois karena keduanya masih tercatat sebagai pengurus syah IJABI Kab. Sampang.<sup>14</sup>
  - (2) Pemerintah meminta agar IJABI mendukung rencana untuk merelokasi sementara waktu Tajul Muluk beserta keluarga ke kabupaten Malang (rumah mertua K. Tajul Muluk) selama setidaknya satu tahun sampai dengan situasi agak mereda. Dalam hal ini IJABI menyetujui rencana tersebut<sup>15</sup>.
- g) Pada 30 april 2011 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang dilaksanakan pertemuan antara Asisten I Pemprop Jatim, pengurus IJABI Jawa Timur dan Tajul Muluk. Dalam pertemuan ini Asisten I Pempro Jatim menyatakan akan mengganti biaya sewa rumah senilai Rp 10.000.000 dan biaya hidup selama satu tahun yang nilainya masih belum ditentukan.

Sejak tanggal 2 april 2011 Tajul telah keluar dari desa Karang gayam, dan untuk sementara waktu Polres Sampang menempatkan dirinya di rumah dinas Wakapolres Sampang. Tajul seolah telah menjadi tahanan rumah Polisi yang kemana-mana mendapat pengawasan dari petugas Polres Sampang. Karena tidak ada kejelasan penyelesaian masalah dari pihak pemerintah, dan tidak nyaman diperlakukan layaknya tahanan rumah, akhirnya pada 16 april 2011, Tajul memutuskan untuk pergi ke kota Malang. Kota Malang dipilih karena di kota ini dia memiliki banyak kerabat dan teman. Tentu saja pihak kepolisian dan pemkab sampang sangat setuju dan mendukung pilihan Tajul. Dan dukungan itu ditunjukkan dengan rencana pemprop Jatim yang akan mengalokasikan anggaran biaya hidup bagi Tajul Muluk selama satu tahun<sup>16</sup>.

Tidak selesai sampai disitu, setelah berhasil mengusir tajul dari desanya, para ulama bersama pemerintah tetap melakukan konsolidasi dan pertemuan-pertemuan untuk sasaran selanjutnya, melegitimasi penyesatan ajaran syiah, dan melikuidasi para pengikut syiah. Berikut adalah pertemuan-pertemuan pasca diusirnya Tajul :

- 1) Pada 25 Mei 2011 di rumah Kades Karang gayam diadakan pertemuan antara Bakesbangpol Sampang, Muspika Kec. Omben dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Karang gayam membahas kondisi Desa Karang gayam pasca terusirnya Tajul Muluk. Dalam pertemuan pemerintah mensosialikan dua hal :
  - Terciptanya situasi kondusif di desa Karang gayam
  - Masyarakat dapat menahan diri karena Tajul Muluk telah diupayakan untuk tinggal di Malang selama satu tahun<sup>17</sup>
- 2) Pada 28 Mei 2011 di Pondok Pesantren Darul Ulum desa Gersempal Omben, diadakan pertemuan ulama se-Madura. Pada intinya pertemuan ini membahas tentang Petisi bulan

<sup>13</sup> Sementara itu, di media massa, Bupati Sampang menyatakan bahwa pemerintah telah siap untuk merelokasi seluruh Jamaah Syiah untuk keluar dari Pulau Madura. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Gubernur Provinsi Jawa Timur (pernyataan tanggal 14 April 2011).

<sup>14</sup> Pemerintah selalu berusaha mengecilkkan persoalan ini hanya pada persoalan keluarga saja, yaitu persoalan antara Tajul dan Rais

<sup>15</sup> Berdasarkan kronologis dan dokumentasi yang dikeluarkan Bakesbang Kab. Sampang

<sup>16</sup> Pemkab sampang memberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000,- bantuan diserahkan pada 8 agustus 2011 dan Pemprov Jatim menyerahkan bantuan sejumlah sebesar Rp 60.000.000,- juta rupiah yang diserahkan pada 15 agustus 2011.

<sup>17</sup> Berdasarkan kronologis dan dokumentasi yang dikeluarkan Bakesbang Kab. Sampang

februari 2011 yang telah ditandatangani ribuan warga Sampang. Petisi berisi tentang pengusiran Tajul Muluk dari Pulau Madura dan upaya pelarangan atas penyebaran ajaran syiah. Selain dihadiri para Ulama (terutama anggota Bassra), hadir juga pejabat Muspida Sampang, Polda Jatim, Mabes Polri dan Slamet Effendi Yusuf mewakili MUI Pusat. Dalam pertemuan ini para Ulama yang hadir mengeluarkan beberapa rekomendasi :

- (1) Mendesak MUI se-Madura untuk menyatakan aliran Syiah di Karang Gayam sebagai ajaran islam yang sesat dan menyesatkan.
  - (2) Menuntut agar Tajul Muluk dan pengikutnya direlokasi segera dari Sampang.
  - (3) Menuntut pemerintah agar melarang segala aktivitas keagamaan pengikut ajaran Syi'ah Imamiyah yang ada di desa Karang Gayam<sup>18</sup>.
- 3) Pada 30 Mei 2011 diadakan pertemuan antara Assinten I Pemprop Jatim, Bakesbangpol Prop. Jatim, Dinas Sosial Prop. Jatim, Ketua MUI Jawa Timur, Sekda Kab.Sampang, Bakesbangpol Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kasat Intel Polres Sampang, Muspika Omben, Ketua MUI Sampang, Kakankemenag Kab.Sampang. Hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut:
- (1) Pemerintah propinsi siap memfasilitasi anggaran relokasi Tajul Muluk dari desa Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang ke Dieng Malang.
  - (2) Pemkab Sampang secara teknis untuk melakukan pendekatan kepada Tajul Muluk guna penandatanganan berita acara relokasi ke perumahan Lembah Dieng Kota Malang.

Pada awal bulan Juli 2011, Tajul mendapat informasi bahwa situasi di Karang gayam telah kembali normal dan hal ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk kembali pulang. Maka pada 24 Juli 2011 dia pulang ke Karanggayam. Berita kepulangan Tajul segera diketahui masyarakat disekitarnya, dan keesokan harinya pada 26 Juli 2011, ratusan massa kembali mengepung kediaman Tajul Muluk dan mengancam akan membakar rumah itu. Akhirnya, untuk yang kedua kali Tajul Muluk kembali diamankan oleh petugas Polres Sampang. Dan seperti pada kejadian sebelumnya, Tajul kembali ditempatkan di kantor polres Sampang layaknya tahanan rumah. Karena khawatir Tajul akan ditahan oleh Polisi, sekitar seratus warga syiah sampang pada 28 juli 2011 datang ke Kantor Polres Sampang dan menuntut kepada Polisi agar Tajul diizinkan pulang bersama mereka ke Karanggayam. Tentu saja pihak Polres Sampang tidak mengijinkan tuntutan tersebut, bahkan para pejabat Polres Sampang menegaskan tidak akan dapat mengendalikan keamanan desa Karang gayam apabila Tajul kembali kesana. Akhirnya, Tajul membatalkan niatnya pulang ke Karang gayam dan demi keselamatan jamaah syiah di desa Karang gayam dia memutuskan kembali lagi ke Malang.<sup>19</sup>

Selama di pengasingan petugas polisi selalu mengawasi gerak-geriknya dan memastikan bahwa dia benar-benar tidak pulang ke desa. Suatu hari, pada 7 Agustus 2011, dalam bulan ramadan, Tajul diam-diam pulang ke desa untuk merayakan awal ramadhan bersama keluarga. Rupanya petugas polisi mengetahui hal ini, dan keesokan harinya sejumlah petugas Polisi menjemput dan mengantarnya keluar desa.<sup>20</sup>

Demikianlah, akhirnya Ust. Tajul Muluk dengan terpaksa harus meninggalkan keluarga dan murid-muridnya Sebuah pilihan yang harus diambilnya demi keselamatan keluarga dan murid-muridnya dari ancaman serangan kekerasan. Di kemudian hari Tajul akan menyadari bahwa pilihan ini adalah sia-sia belaka, karena walaupun dia telah meninggalkan Karang gayam pada akhirnya kekerasan tetap terjadi tanpa bisa dicegah oleh pemerintah dan aparat keamanan.

---

<sup>18</sup> Dokumen Musyawarah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (KUI) kabupaten Se-Madura di Sampang, 28 Mei 2011

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tajul Muluk

<sup>20</sup> Dokumen Pemkab. Sampang

### III Aksi Kekerasan dan Fatwa Sesat

#### III.1. Kronologi Pembakaran Rumah dan Pesantren

Semua pihak yang berwenang di Sampang telah mengambil keputusan bahwa solusi awal dalam penyelesaian konflik sunni-syiah adalah dengan mengasingkan Ust. Tajul Muluk ke luar Pulau Madura, keputusan ini jelas telah mengabaikan hak-hak dasar Tajul Muluk sebagai warga negara. Menurut keterangan kepala dusun Nangkernang, sejak kepergian Tajul situasi di Nangkernang menjadi lebih kondusif, tidak ada lagi ancaman serangan dan pengumpulan massa, para kyai yang selama ini menentang keberadaan jamaah syi'ah berpendapat bahwa para pengikut syiah di desanya hanyalah ikut-ikutan saja. Dengan ditinggal Tajul, maka warga yang menjadi pengikut syiah akan segera berbalik kepada ajaran sunni.<sup>21</sup> Kesimpulan para kyai ternyata salah. Walaupun tidak ada Tajul Muluk, aktifitas di pesantren misbahul huda tetap berjalan normal. Untuk mengkoordinir aktivitas belajar para santri yang berjumlah 130 orang, Tajul menunjuk Alimullah Muhi (22), asal Desa Blu'uran, Kec. Karangpenang. Alimullah Muhi yang akrab dipanggil ustad ali adalah murid Tajul paling senior. Ali bersama Iklil al Milal (kakak Tajul) dan Syaiful (adik ipar Tajul) adalah para ustad di pesantren Misbahul Huda.

Kegigihan jamaah syiah dalam mempertahankan keyakinannya membuat situasi desa kembali memanas. Situasi aman ternyata hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Tanpa diketahui sebab yang jelas pada dini hari tanggal 20 Desember 2011 di dusun Gedeng laok, rumah Muhammad Sirri, salah satu pengikut syiah dan masih kerabat Tajul, dibakar massa. Sebelum dibakar pintu rumah di tutup dengan palang kayu dari depan, untungnya Sirri berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Polisi terkesan mengabaikan peristiwa ini dan tidak menangkap pelaku pembakaran. Hal ini disimpulkan oleh masyarakat desa bahwa beramai-ramai membakar rumah orang-orang syiah tidak akan ditindak Polisi.

Sejak peristiwa dibakarnya rumah Sirri, seruan serangan terhadap pengikut syiah semakin gencar dilakukan para tokoh anti syiah.<sup>22</sup> Pada pagi hari tanggal 29 Desember 2011, ibu Misnawi (salah satu pengikut syiah di Karang gayam) menelphone Tajul Muluk, dan menjelaskan telah tersiar kabar bahwa hari ini akan terjadi penyerangan ke pesantren dan rumahnya. Tajul kemudian menginformasikan hal ini kepada Iklil dan Riyanto, salah satu intel Polres Sampang yang kerap berjaga disana. Tajul juga berusaha menghubungi beberapa pimpinan Polres Sampang, akan tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Alimullah yang sehari-hari bertugas memimpin pesantren pada sekitar pukul 08.00 mengetahui ada massa berkumpul dan akan bergerak membakar pesantren. Ali segera menginformasikan hal ini kepada Iklil dan untuk mencegah adanya korban, Ali meminta sebanyak 20 santri yang menginap di pesantren untuk segera pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Ali dan pengajar lainnya serta istri dan anak-anak Tajul mengungsi ke rumah Nurhalimah yang rumahnya terletak sekitar 200 meter sebelah timur pesantren. Ali tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya tidak berani mendatangi apalagi menghalau massa, lantaran takut dibunuh.

Setelah mendapat informasi dari Ali, Iklil menghubungi nomor telepon Kapolsek Omben untuk meminta perlindungan. Satu hari sebelumnya kapolsek telah memberikan informasi bahwa penyerangan ini akan terjadi. Iklil menjelaskan bahwa pada rabu 28 Desember 2011, dirinya telah dipanggil Kapolsek Omben, AKP Aris di Kantor Polsek Omben. Pada pertemuan ini Kapolsek memberi tahu Iklil bahwa akan ada penyerangan ke Dusun Nangkrenang oleh kelompok anti-Syi'ah. Keterangan polisi ini antara lain didasarkan atas kenyataan bahwa pada hari itu, jalan setapak menuju pesantren Misbahul Huda sudah diputus warga dengan cara diberi tumpukan batu dan ditancapi beberapa batang bambu dan besi. Meski sudah berulang kali dihubungi, Iklil hanya melihat ada dua personil keamanan yang datang ke lapangan, satu orang personil dari Polsek Omben dan satu orang tentara dari Koramil Omben. Kedua petugas ini tidak berbuat apa-apa kecuali hanya memantau dan mendokumentasikan peristiwa ini melalui kamera hand phone.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Dusun Nangkernang

<sup>22</sup> Dalam wawancara dengan Zaini (salah satu santri Taju Muluk), dia menjelaskan bahwa beberapa kali dia menyaksikan kyai Rois dan pendukungnya mengatakan akan membakar rumah tajul muluk dan pesantren misbahul huda apabila aktifitas belajar agama tidak dihentikan.

Akhirnya, pada sekitar pukul 09.00 massa yang berjumlah sekitar 500-an mengepung pesantren dan dalam waktu singkat merusak dan membakarnya hingga habis. Kompleks pesantren yang terdiri dari rumah tinggal keluarga Tajul, mushala, ruang kamar santri, ruang kelas, toko kelontong, dan segala isinya ludes habis terbakar. Menurut penjelasan Kapolres Sampang AKBP Solehan, bahwa pada saat terjadinya pembakaran rumah dan pesantren Tajul, sekitar pukul 9.30 dirinya dan puluhan petugas polres tiba di lokasi kejadian. Akan tetapi dirinya memutuskan tidak mencegah dan menghalau massa, sebab jumlah petugas polisi yang ada tidak sebanding dengan jumlah massa yang menyerang dan massa yang bersenjatakan aneka ragam senjata tajam mengancam akan melawan dan membunuh petugas apabila mencegah tindakan mereka<sup>23</sup>.

Setelah selesai membakar rumah tajul dan pesantrennya hingga rata dengan tanah, massa bergerak menuju rumah Iklil Al-milal. Rumah Iklil ada di dusun Geding Laok yang berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi pesantren. Sekitar pukul 11.00 massa tiba di rumah Iklil, sama dengan pesantren, rumah Iklil juga dirusak dan dibakar hingga menjadi abu. Belum puas membakar rumah Iklil, selanjutnya massa bergerak ke rumah Syaiful di dusun Solong Berek Karang Gayam yang berjarak sekitar 1 km. Akhirnya rumah Syaiful juga dibakar habis sama seperti pesantren dan rumah Iklil. Bahkan massa juga sempat menjarah rumah Suhairi, seorang keluarga pengikut syiah yang baru saja pulang dari bekerja sebagai TKI di Malaysia. Menurut pengakuan warga syiah, peristiwa pagi itu berjalan begitu cepat sehingga mereka tidak sempat mengetahui secara pasti identitas massa penyerang. Namun menurut dugaan mereka, sebagian besar pelaku, terutama yang menggunkan penutup wajah saat pembakaran, adalah tetangga mereka sendiri. Sebab, selama ini merekalah yang getol memusuhi keberadaan warga Syiah di Nangkernang. Sementara itu, Tajul Muluk dengan yakin mengatakan bahwa otak dan pemimpin aksi pembakaran itu adalah adiknya sendiri, yaitu Roisul Hukama walaupun saat peristiwa itu terjadi Rois tidak ada nampak di lokasi kejadian.

Khawatir warga pengikut syiah akan memberikan perlawanan dan dapat menimbulkan korban di kedua pihak, maka pada pukul 13.00 aparat kepolisian mendatangi rumah-rumah warga pengikut syiah dan mengevakuasi mereka ke kantor kecamatan Omben. Karena keadaan di kantor kecamatan Omben yang tidak memungkinkan menampung warga syi'ah maka selanjutnya dengan menggunakan bus milik Polda Jatim warga syi'ah dipindah ke Gedung Olah Raga Kabupaten Sampang yang berada tepat di depan kantor Bupati Sampang. Dari total jamaah Syiah di dusun Nangkernang yang berjumlah 584 orang atau 135 kepala keluarga hanya 306 orang yang dievakuasi, dimana sebagian besar terdiri perempuan, anak-anak, bayi dan balita.

Menurut pengakuan warga syiah, evakuasi ini tidak dilakukan atas dasar kemauan pribadi, tapi dipaksa oleh petugas kepolisian dengan mendatangi rumah masing-masing warga yang sudah terdata sebagai anggota jamaah Syiah. Warga Syiah ini, diinstruksikan oleh petugas polisi dan aparat desa untuk segera meninggalkan rumahnya tanpa diizinkan untuk mengemasi barang-barang. Karena itu, selama di pengungsian tak satupun harta benda yang mereka bawa. Relatif sebagian besar warga yang mengungsi hanya berbekal pakaian yang melekat di badan mereka.

### **III.2 Intimidasi di pengungsian dan fatwa sesat atas pengikut ajaran syi'ah**

Berdasarkan pemantauan KontraS, pengamanan oleh kepolisian di lokasi Gedung Olah Raga Sampang (Gor Sampang) cukup longgar. Hanya ada beberapa orang petugas yang ditempatkan disana. Hal ini memudahkan siapa saja masuk ke dalam ruangan pengungsian. Padahal hampir setiap hari, pengungsi selalu diliputi ketegangan karena ada informasi dari petugas polisi mereka akan diserang massa anti syiah apabila keluar dari lokasi Gor Sampang. Di Gor Sampang yang berbentuk gedung bundar tertutup ini pengungsi tidur beralaskan tikar dan karpet seadanya. Banyak diantara mereka harus tidur beralaskan kardus karena jumlah tikar dan karpet yang tidak mencukupi. Untuk kebutuhan sehari-hari, para pengungsi tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang cukup. Mereka hanya mendapatkan jatah makanan berupa nasi bungkus sebanyak tiga kali dalam sehari. Nasi bungkus yang diberikan hanya berisi nasi dan lauk seadanya (sedikit sayur, ikan asin, tempe, dan sepertiga telur). Di Gor

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kapolres pada 13 januari 2011

Sampang, hanya ada satu kamar mandi, tentu saja hal ini sangat tidak berimbang dengan kebutuhan pengungsi yang berjumlah ratusan orang. Pembuatan kamar mandi dan WC darurat baru disediakan oleh pemerintah setelah satu minggu pengungsi menghuni Gor Sampang. Belum lagi soal kesehatan. Sama sekali tidak ada dokter yang memantau atau memeriksa keadaan kesehatan pengungsi. Untuk pelayanan kesehatan hanya ditempatkan beberapa petugas dari dinas kesehatan yang tidak terlalu peduli dengan keadaan pengungsi. Keadaan semakin runyam ketika pemerintah melarang pengungsi mendirikan dapur umum, sedangkan pemerintah tidak menyediakan logistik yang memadai. Sebagian besar pengungsi adalah anak-anak, akan tetapi pemerintah tidak menyediakan kebutuhan belajar dan bermain serta kebutuhan psiko sosial bagi anak-anak. Bahkan untuk kebutuhan dasar bagi balita pun juga tidak tersedia. Banyak diantara ibu-ibu kesulitan untuk memandikan bayinya karena tidak ada air hangat.

Dalam keadaan yang semacam ini, pemerintah justru menghambat masuknya bantuan-bantuan sosial dari masyarakat. Setiap bantuan yang datang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ketua BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sampang. Bagi Pemkab Sampang, memfasilitasi pengungsi hanyalah menjadi beban mereka. Kepala BPBD Sampang mengeluh karena setiap harinya harus menyediakan makan bagi pengungsi. Dia mengeluhkan bahwa keberadaan pengungsi selain menambah beban anggaran karena harus menyediakan 800 bungkus nasi (300 untuk pengungsi dan 500 untuk petugas keamanan). Selain itu, pengungsi juga dinilai bisa mengundang perhatian dan opini negatif bagi pemerintah Sampang, inilah yang menjadi alasan kenapa pemda selalu mempersulit bantuan luar masuk. Bantuan yang masuk dinilai akan menyudutkan pemerintah.

Selang sehari setelah peristiwa pembakaran, pada 30 Desember 2011, Pemkab, DPRD, seluruh aparat keamanan, MUI Sampang, dan PC NU Sampang melakukan koordinasi terkait solusi konflik ini. Pada saat itu, Bupati Sampang, Noer Tjahja menjelaskan bahwa pemicu kekerasan massa adalah masalah keluarga dan penistaan agama sebagaimana dikatakan MUI Sampang. Kedepan, Pemkab berencana akan memilah-milah semua jemaah Syiah di wilayah Kecamatan Omben dalam kategori fanatik dan tidak. Untuk yang fanatik, rencananya akan ditransmigrasikan ke luar pulau Madura. Tindakan ini diambil Pemkab dengan alasan bahwa Kepala Desa Blu'uran, Kec. Karangpenang telah menyatakan bahwa bila ada penangkapan terhadap pelaku pembakaran, masyarakat siap perang sampai mati. Kebijakan ini bukan hanya diamini semua pihak yang berwenang di Sampang, bahkan Pemprov Jatim, melalui Wakil Gubernur, Saifullah Yusuf menyetujui hal tersebut. Setelah rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Pemkab itu dilakukan, secara beruntun rapat-rapat sejenis juga dilakukan hampir semua lembaga keagamaan di Sampang.

Pada prinsipnya, semua rapat-rapat itu bertujuan untuk menemukan dasar hukum bahwa Tajul Muluk memang menistakan agama. Dalam rapat internal MUI Sampang tanggal 1 Januari 2012 atau rapat PC NU yang dilakukan pada tanggal 2 Januari misalnya, keduanya memutuskan bahwa ajaran yang dibawa Tajul Muluk dinilai sebagai penodaan agama yang menimbulkan keresahan warga. Karena itu, bagi MUI dan PC NU Sampang, Tajul Muluk sebagai pelaku penyebaran ajaran sesat dan menyetakan itu harus dihadapkan di pengadilan. Kekerasan yang terjadi pada 29 Desember itu terjadi bukan lantaran masyarakat sunni yang bertindak radikal, itulah hanyalah akibat dari keresahan atas penyebaran ajaran Syiah Tajul.

Sikap pihak pemerintah dan tokoh keagamaan di Sampang yang satu kata mengatakan bahwa Tajul Muluk telah melakukan penodaan agama dan sebagai pihak yang bersalah pada akhirnya memberikan persepsi umum yang sama pada masyarakat Sampang. Hampir semua orang di Sampang mengatakan bahwa orang-orang Syiah yang mengungsi di Gor Sampang adalah penjahat agama, sehingga bantuan untuk pengungsi memang tidak layak untuk diberikan. Malah, bantuan-bantuan yang datang dinilai akan memanjakan pengungsi yang jelas bersalah. Karena itulah, meski sejak hari pertama warga syiah yang mengungsi di Gor Sampang mengalami keterbatasan logistik dan keadaan yang tidak layak, masyarakat di sekitar lokasi Gor Sampang sama sekali tidak menaruh peduli.

Pada 4 Januari 2011, anggota Komnas HAM Kabul Supriadi dan Hesti Armi Wulan meninjau keadaan pengungsi di Gor Sampang. Komnas HAM menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini, akan tetapi mereka belum dapat mengeluarkan rekomendasi apapun. Tidak ada langkah maupun tindakan serius yang dilakukan Komnas HAM dalam membantu memperbaiki keadaan pengungsi. Bahkan Hesti Armiwulan sempat

diprotos para pengungsi karena membujuk warga untuk kembali pulang ke desa tanpa bisa memastikan jaminan keamanan bagi warga syi'ah dan penyelesaian hukum atas peristiwa pembakaran. Tajul Muluk yang sejak hari pertama ikut mengungsi ke Gor Sampang menekankan bahwa semua warga syiah yang mengungsi akan dengan sukarela kembali pulang apabila para pelaku pembakaran ditangkap dan polisi menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi. Menurut Tajul, tanpa penangkapan pelaku, tidak mungkin ada jaminan keamanan. Sebab, jika pelaku tetap dibiarkan maka kedepan tindakan kekerasan yang sama juga pasti akan berulang. Dua hari setelah kejadian, sebenarnya polisi menyatakan telah menangkap seorang tersangka, yaitu Musrika. Namun warga Syiah yang menyaksikan pembakaran itu menegaskan bahwa para pelaku utama pembakaran adalah tetangga mereka sendiri yang mereka kenal, dan Musrika bukanlah tetangga mereka dan kemungkinan besar bukan pelaku utama pembakaran.

Tuntutan warga Syiah, ternyata dibalas Pemda dengan teror dan tekanan. Dengan alasan keberatan menanggung kebutuhan pengungsi yang telah lima hari tinggal di Gor Sampang pemerintah menginformasikan bahwa bantuan makanan akan dihentikan. Tapi karena adanya beberapa lsm yang memantau di Gor Sampang berkomitmen akan memberikan bantuan makanan kepada pengungsi, pemerintah membatalkan ancamannya. Meski terlambat, bantuan makanan tetap diberikan kepada para pengungsi. Bedanya, jika dulu penanganan pengungsi Syi'ah dibawah tanggung jawab Pemkab langsung, mulai Kamis, 5 Januari 2012 diambil alih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang. Karena alasan keberatan menanggung kebutuhan pengungsi terdengar tidak masuk akal, selanjutnya pemerintah menggunakan alasan lain. Pada kamis, 5 Januari 2012, pukul 17.30 WIB, seorang pengungsi yang bernama Jemali mengaku dipaksa ikut ke Kantor Polres Sampang dengan menggunakan mobil patroli. Di kantor Polres, Kapolres meminta Jemali untuk membujuk jamaah Syi'ah agar mau pulang ke desa karena Gedung yang ditempati pengungsi akan dipergunakan untuk kegiatan lomba tenis Indoor pada tanggal 13 Januari 2012. Kegiatan itu adalah bagian dari acara peringatan HUT Kabupaten Sampang, karena itu pengungsi harus meninggalkan GOR Sampang maksimal sampai tanggal 12 Januari 2012. Jemali menjawab bahwa dirinya tidak mungkin bias membujuk teman-temannya pulang kedesa apabila polisi tidak menangkap orang-orang yang melakukan pembakaran.

Akhirnya, teror kepada pengungsi berlanjut. Pada pada 6 Januari 2011, empat kamar mandi semi permanen di bagian luar Gor Sampang dibongkar dan bantuan stok air bersih untuk kebutuhan sehari-hari juga dihentikan. Akibatnya, pengungsi terpaksa melakukan MCK di sungai kecil yang ada di dibelakang Gor Sampang. Persoalan air dapat teratasi setelah pada keesokan harinya ada bantuan air dari komunitas Jauzan<sup>24</sup>. Sebenarnya pengungsi bersedia kembali ke desa, akan tetapi apabila hal ini tidak diimbangi oleh sikap pemerintah dan Polisi untuk menangkap para pelaku pembakaran maka kepulangan mereka kedesa adalah hal yang sia-sia. Seolah tidak peduli dengan tuntutan warga syiah, Pemkab Sampang melalui Kepala Bakesbang Sampang balik mengatakan bahwa jika ingin tetap bertahan, maka hal akan itu dibiarkan saja sesuai keinginan pengungsi. Tapi bantuan tidak akan diberikan lagi<sup>25</sup>. Menurut Pemkab, Warga Karanggayam sendiri sebenarnya mau menerima pengungsi syiah, asal empat orang pemimpin Syiah yang berada di pengungsian tidak ikut kembali ke Karanggayam . Empat pemimpin Syiah yang dimaksud adalah Ustadz Tajul Muluk, Ustadz Iklil Milal, Ustadz Syaiful, dan Ustadz Ali karena mereka dianggap sebagai sebab dan biang keladi keresahan yang berakibat pada kekerasan pada 29 Desember.

Sebaliknya, Kepolisian juga tidak dapat memenuhi tuntutan jaminan keamanan. Pasalnya, para pelaku merupakan preman yang menjadi penguasa Madura. Jika ditangkap, maka kelompok preman ini akan membuat Sampang berkobar<sup>26</sup>. Sampai hari kesembilan, pada 7 Januari 2012, belum juga ada jawaban dari pihak yang pemerintah dan polisi terkait tuntutan pengungsi. Sementara itu ancaman dan teror yang dilakukan pemerintah tidak juga berhenti. Selama dua hari terakhir, paling tidak Tajul Muluk sudah dua kali diajak mediasi dengan Polres dan Bakesbangpol Sampang terkait pemulangan pengungsi. Pertemuan pertama

---

<sup>24</sup> Komunitas Jauzan adalah komunitas kemanusiaan yang concern dalam bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam. Komunitas ini sejak hari pertama telah melakukan pemantauan di lokasi pengungsian.

<sup>25</sup> Pernyataan ini disampaikan kepada Tajul Muluk.

<sup>26</sup> Penjelasan ini disampaikan Kasatintelkan Polres Sampang kepada Tajul Muluk

diadakan sekitar pukul 22:30 WIB dan pertemuan kedua diadakan sekitar pukul 15:30 WIB. Pertemuan pertama tidak menghasilkan apa-apa, sementara pertemuan kedua Polres menyatakan dengan tegas memaksa untuk tetap memulangkan pengungsi paling lambat Senin, 9 Januari 2012. Jika warga Syiah tetap ngotot bertahan, dengan terpaksa Pemkab akan melakukan evakuasi secara paksa. Usaha Pemerintah untuk membujuk warga Syiah agar mau dipulangkan berlanjut esok harinya, Minggu 8 Januari. Sekitar pukul sembilan pagi, satu rombongan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bakesbangpol dan Polres secara bersama-sama datang ke Gor Sampang meminta Tajul Muluk agar mau dipulangkan. Bahkan aparat sudah mempersiapkan satu truk untuk mengangkut pengungsi. Pilihannya ada dua, jika tidak mau dipulangkan ke Nangkernang, warga Syiah akan diungsikan di Kec. Ombem. Namun karena sampai jam 10:00 negoisasi antara Tajul dan aparat pemerintah buntu, akhirnya evakuasi tidak jadi dilakukan pada hari itu.

Situasi berubah mencekam pada sore harinya. Tepat habis Maghrib, beredar isu akan ada penyerangan ribuan massa ke Gor. Massa yang berasal dari Ombem itu berupaya mendesak Polres Sampang agar menangguk penahanan salah seorang tersangka pembakaran yang bernama Asifin. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, massa akan membakar kantor Polres, dan akan meneruskan aksinya ke Gor tempat warga Syiah mengungsi. Menghadapi teror itu, habis Maghrib, semua pengungsi bersiap akan melawan serangan. Dengan membaca sholawat "Allahumma solli allah muhammad, wa ala ali muhammad." secara berulang-ulang, mereka mempersenjatai diri dengan batu-batu dan kayu yang berserakan di Gor. Sampai pukul 20:00 massa tidak juga datang. Dua jam kemudian salah satu intel polisi di Gor mengabarkan bahwa polisi telah melepaskan pelaku dengan alasan salah tangkap. Insiden ini menyadarkan para pengungsi bahwa mereka memang tidak dapat berharap banyak dari kepolisian.

Pada Selasa, 10 Januari 2012, diadakan pertemuan antara Kuasa Hukum Tajul, Hadun Hadar, Rudi Setiadi dari Bakesbangpol Sampang dan Kapolres Sampang AKBP Solehan. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa karena tindakan hukum belum bisa dilakukan, maka yang diprioritaskan adalah perhitungan kemanusiaan. Poin-poin penting kesepakatan itu antara lain; Pertama, semua stakeholder yang ada di sampang harus ikut menandatangani surat kesepakatan damai dari mulai kelurahan hingga bupati sebagai para-pihak dan berjanji tidak akan mengeluarkan statement yang bersikap provokatif dan bernada permusuhan. Kedua, jemaah Syiah akan dikembalikan ke rumah masing-masing. Semua properti perumahan dan harta yang dibakar maupun dijarah akan diganti oleh Pemkab. Ketiga, Ust Tajul, Ust. Ikliil, Ust. Syaiful dan Ust. Ali tidak diperbolehkan kembali ke kampung dan sementara waktu akan tinggal di Hotel yang disediakan oleh Pemkab. Sampang. Dalam pertemuan ini LSM yang terdiri dari KontraS, Aman Indonesia, Mer-C dan kuasa hukum Tajul bertindak sebagai saksi. Menurut Rudi, opsi terakhir terpaksa diambil karena merupakan syarat utama masyarakat untuk dapat menerima waga syiah kembali ke kampungnya.

Sehari berselang dibuatnya rancangan kesepakatan itu, pada hari Rabu 11 Januari 2012 Bakorpakem Sampang mengeluarkan keputusan yang menyatakan Syiah sesat dan keputusan ini dimuat secara eksklusif di Koran Radar Madura. Keputusan Bakorpakem ini jelas bertentangan dengan nota kesepakatan yang dibuat sehari sebelumnya di mana setiap para-pihak dilarang mengeluarkan pernyataan bermusuhan. Keputusan Tim Bakorpakem yang terdiri dari Polres Sampang, Dandim 0828, Bakesbangpol, Kemenag, Disbudparpora dan MUI didasarkan pada hasil penelitian Bakorpakem yang menemukan bahwa dalam syiah terdapat adajar Rukun iman ada lima, Rukun Islam ada delapan, dan shalat hanya tiga kali. Akibat statement yang dikeluarkan oleh Bakorpakem itu, situasi pun kembali labil. Tajul Muluk menganggap bahwa statement itu sama artinya dengan pengesahan atas tindak kekerasan terhadap pengikutnya di masa-masa berikutnya.

Akhirnya Tajul membatalkan rencana para pengungsi yang akan pulang pada hari itu, padahal hampir semua relawan lokal mulai tidak terlihat, tenda darurat PMI sudah dibongkar, Tagana tidak lagi membagikan makanan, dan terakhir KAS (Komite Anak Sampang) juga pamit. Alasan KAS untuk meninggalkan lokasi karena bantuan pendidikan kepada anak-anak pengungsi yang selama ini mereka berikan dilarang oleh Pemkab setempat. Personel Polisi dan Satpol PP yang biasa berjaga di Gor Sampang juga sudah tidak terlihat lagi. Hanya mobil kosong dengan plat Polres Sampang yang nampak diparkir di depan Gor Sampang.

Sampai Kamis 12 Januari, tidak ada penjelasan dari pemerintah terkait pernyataan Bakorpakem. Tapi Kapolres ketika dihubungi KontraS bersedia melakukan kesepakatan ulang

pada siang pukul 10:00 terkait proses pemulangan pengungsi dan perlindungan bagi mereka. Tapi sampai pukul 11:00 tidak ada konfirmasi dari kapolres, ketika dihubungi KontraS, Kapolres menyatakan menunda pertemuan ini karena dirinya harus mengawal demonstrasi penolakan relokasi Pasar yang tempatnya bersebelahan dengan Gor Sampang. Kapolres menjanjikan akan menjadwalkan pertemuan pada pukul 12:00. Sampai dengan pukul 12:30 Kapolres tidak juga menghubungi. Sekitar pukul 13.00, tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba sejumlah pejabat dan pegawai Pemkab Sampang dengan dikawal Petugas Satpol PP dan Polisi datang ke dalam Gor Sampang. Abd. Halim Toha dari Depag Sampang melalui alat pengeras suara sambil berkaca pinggang dan menggunakan bahasa Madura, menginstruksikan agar pengungsi segera meninggalkan Gor Sampang karena situasi di Nangkernang sudah aman dan dalam waktu dekat Gor Sampang akan digunakan untuk kegiatan perlombaan tennis menyambut hari jadi ke-388 Kabupaten Sampang. Selain itu, kata Halim, walaupun masyarakat Sunni di Nangkerang bersedia menerima keberadaan warga Syiah, tetapi keempat pemimpin syi'ah yaitu Tajul Muluk, Ikilil, Syaiful, dan Ali tidak boleh menyertai mereka. Ketika Hadun Hadar, kuasa hukum Tajul memprotes tindakan Abd Halim mengatakan, bagi pihak yang tidak terima dipersilahkan datang ke kantornya. Dia juga mengatakan, 'Saya ini Depag, orang yang paling tau masalah agama di Sampang. Siapapun anda tidak dapat menghalangi'. Sampai beberapa saat pengungsi sempat bertahan, tapi usaha mereka tidak berarti apa-apa karena rombongan Satpo PP langsung masuk Gedung dan menggulung semua tikar dan karpet yang menjadi alas tidur pengungsi. Keadaan menjadi panik, banyak anak-anak menjerit menangis karena ketakutan.

Merespon tindakan Abdul halim dan petugas Satpol PP Tajul Muluk menyeru kepada jemaahnya, 'Sudah tidak ada hukum di Sampang ini. Ini seperti Karbala. Labaika Ya sayyidina Husein.' Dia tegaskan bahwa dirinya siap mati menghadapi ribuan massa yang dikabarkan telah berjaga-jaga untuk menghadang dan membunuhnya jika memaksa tetap pulang ke Dusun Nangkernang. Sesampai di luar GOR, meski disana sudah ada mobil satpol PP yang siap mengangkut mereka, namun warga Syiah menolak menggunakan fasilitas Pemkab tersebut. Pengungsi memilih menunggu sampai sekitar 3 jam untuk menunggu truk sewaan dari relawan Surabaya. Akhirnya pukul 16:00 tujuh truk pun datang. Ketika rombongan pengungsi akan berangkat, Wakapolres Sampang kembali mengingatkan agar Tajul Muluk dan ketiga ustadz lainnya tidak ikut serta pulang. Wakapolres dan beberapa pejabat Pemkab menegaskan bahwa ribuan massa telah siap menghadang apabila Tajul dan ketiga ustad yang lain ikut pulang. Selama satu jam terjadi diskusi yang dramatik. Beberapa orang sampai menangis untuk meyakinkan Tajul agar dirinya tidak ikut pulang karena resikonya adalah kematian, sementara dirinya masih sangat dibutuhkan oleh murid dan jemaahnya. Dengan berat hati, akhirnya Tajul dan ketiga ustad yang lain beserta keluarganya tidak ikut kembali pulang. Pada sekitar pukul 17:30 WIB, rombongan pengungsi berangkat menuju Desa Karanggayam. Dengan diguyur hujan lebat pada saat perjalanan, pengungsi Syiah mendapat cemoohan dan sorakan dari masyarakat sunni laiknya tahanan pulang dari penjara. Sebuah isyarat bahwa konflik syiah-sunni masih jauh dari penyelesaian. Sementara itu, Tajul dan ketiga ustad yang lain beserta keluarganya pada malam itu diinapkan oleh pemerintah di Hotel Tronojo. Karena merasa tidak leluasa dibawah penjagaan polres dan seolah menjadi tahanan rumah, akhirnya pada Jumat, 13 Januari ketiga keluarga tersebut meninggalkan Madura dan untuk sementara waktu memilih tinggal di Malang.



## IV Kesimpulan dan Rekomendasi

### IV.I. Kesimpulan

Hal paling mendasar dalam kasus syi'ah Sampang adalah Pemerintah Daerah Sampang termasuk Polisi, tidak memiliki perspektif bahwa setiap warga negara berhak berkeyakinan, beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan pemerintah wajib menyelenggarakan perlindungan secara hukum dan politik atas hak ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 12 2005 ttg pengesahan ICCPR, dan UU Nomor 39 tahun 2009 tentang HAM. Hak berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dan dihilangkan dalam keadaan apapun (non derogable rights).

Dari runutan peristiwa demi peristiwa yang terjadi, Pemerintah (khususnya Pemerintah Kabupaten Sampang) sangat permisif dengan berbagai upaya penyesatan, ancaman, hingga serangan kekerasan atas komunitas syi'ah. Mengapa Pemerintah Sampang bersikap demikian? Setidaknya ada dua jawaban sederhana yang bisa mengemuka, *pertama* alasan stabilitas<sup>27</sup>. Pemerintah beranggapan bahwa dengan membela kepentingan mayoritas maka konflik akan dengan mudah diselesaikan dan stabilitas dengan segera dapat di tegakkan. Pemerintah Sampang dan juga Polisi beranggapan bahwa minoritas syi'ah di desa Karanggayam adalah sumber masalah karena mereka meyakini suatu *keyakinan* yang *mengganggu* eksistensi dan kehormatan mayoritas muslim yang menganut ajaran *sunni*. Karena itu dengan *menuruti* keinginan mayoritas dan *menggencet* minoritas maka situasi akan segera dapat dipulihkan. Kita dapat membayangkan, apa jadinya bila perspektif ini digunakan oleh pemerintah? Berapa banyak korban yang akan jatuh? *Kedua*, politik lokal Madura. Dalam konteks sosio-politik Madura, para kyai dan ulama pada umumnya adalah para tokoh masyarakat yang memiliki basis massa *patron klien* yang kuat. Tidak ada tokoh formal maupun tokoh informal yang memiliki pengaruh melebihi dari pengaruh para kyai, dan para ulama atau kyai di Madura (termasuk Sampang) pada umumnya adalah pengikut ajaran islam *sunni* yang jelas berbeda dengan ajaran syi'ah. Artinya, dukungan kyai adalah jaminan bagi setiap politisi di Madura untuk memenangkan kontestasi politik di daerahnya. Karena itulah, Bupati dan politisi Sampang cenderung mengamini segala sikap dan tuntutan para kyai.

Kedua faktor inilah yang menjadi kesimpulan KontraS Surabaya mengapa Pemerintah Sampang melakukan pembiaran atas pelanggaran hak kebebasan berkeyakinan dan beragama bagi pengikut syi'ah di Samang. Hingga laporan ini dikeluarkan, warga syi'ah di Karanggayam melaporkan bahwa mereka tidak dapat menjalankan ibadah dan mengekspresikan keyakinannya secara terbuka. Di masjid desa, oleh tokoh dan aparat desa setempat mereka dilarang menjalankan shalat yang sesuai dengan ketentuan ajaran syi'ah yang mereka yakini. Kedepan, tampaknya situasi ini akan terus berlangsung, selama pemerintah tidak mampu menjamin perlindungan bagi minoritas syi'ah.

### IV.II. Rekomendasi

Rekomendasi yang bisa disampaikan sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan investigasi atas kasus syi'ah sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong akuntabilitas pemerintah, kepolisian dan aparat hukum yang lain untuk proses pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.
- 2) Mengupayakan *kampanye damai* melalui penguatan pendidikan dan sosio kultural bagi masyarakat di wilayah konflik;  
Dalam konteks ini merujuk pada metode penguatan partisipasi komunitas baik dari kelompok minoritas dan mayoritas.
- 3) Advokasi media massa.  
Media massa harus didorong menjadi kekuatan yang mengarahkan opini masyarakat bukan pada soal sesat-tidak sesat, melainkan pada penghormatan pada keyakinan seseorang dan mengakui hak warga negara bebas beragama dan berkeyakinan.

---

<sup>27</sup> Dalam beberapa kesempatan di forum-forum terbuka, pejabat kab. Sampang selalu menyampaikan bahwa yang menjadi perhatian paling utama dari pemerintah adalah mewujudkan stabilitas daerah Sampang.

4) Penguatan lembaga-lembaga agama

Dalam kasus ini, penguatan lembaga-lembaga agama yang dimaksud adalah mendorong kapasitas lembaga-lembaga agama tersebut untuk melakukan dialog yang damai antar iman dan *antar madzab*.